

## **PEREKONOMIAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN PALEMBANG**

**Ari Azhari, Holijah, Sayyidina Mufakkar**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri Km.3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan

E-Mail: [ariazhari\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ariazhari_uin@radenfatah.ac.id)

**Abstract:** *The Palembang Darussalam Sultanate, which was established from 1659 to 1823, was one of the most important Islamic kingdoms in the archipelago that implemented an economic system based on Islamic sharia principles. As a strategic trading center in the Strait of Malacca, this sultanate developed an economic system that integrated Islamic values with international trade practices. The research used a historical method with a qualitative descriptive-analytical approach. Data collection techniques were carried out through library research. The Palembang Sultanate implemented a comprehensive Islamic economic system with the following characteristics: (1) An organized zakat system through the baitul mal institution as an instrument for redistributing wealth and a source of state income; (2) Management of productive waqf for the development of religious infrastructure, education, and public facilities; (3) Implementation of the principles of muamalah in trading activities by avoiding usury, gharar, and maysir. The Islamic economy during the Palembang Sultanate demonstrated the success of implementing the sharia economic system on a kingdom scale that was able to integrate spiritual and material aspects.*

**Kata Kunci:** *Islamic Economis, Sultanate.*

**Abstrak:** Kesultanan Palembang Darussalam yang berdiri pada tahun 1659 hingga 1823 merupakan salah satu kerajaan Islam terpenting di Nusantara yang menerapkan sistem perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai pusat perdagangan strategis di Selat Malaka, kesultanan ini mengembangkan sistem ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik perdagangan internasional. Penelitian menggunakan metode historis dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Kesultanan Palembang menerapkan sistem ekonomi Islam yang komprehensif dengan karakteristik: (1) Sistem zakat yang terorganisir melalui lembaga baitul mal sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan sumber pendapatan negara; (2) Pengelolaan wakaf produktif untuk pembangunan infrastruktur keagamaan, pendidikan, dan fasilitas umum; (3) Implementasi prinsip muamalah dalam aktivitas perdagangan dengan menghindari riba, gharar, dan maysir. Perekonomian Islam pada masa Kesultanan Palembang menunjukkan keberhasilan implementasi sistem ekonomi syariah dalam skala kerajaan yang mampu mengintegrasikan aspek spiritual dan material.

**Kata Kunci:** Ekonomi, Islam, Kesultanan.

## **PENDAHULUAN**

Kesultanan Palembang, yang berdiri pada abad ke-16, merupakan salah satu kesultanan yang memiliki pengaruh besar di Sumatera, khususnya dalam konteks perekonomian Islam. Terletak di tepi Sungai Musi, Palembang menjadi pusat perdagangan yang strategis. Menurut sejarah, Palembang merupakan jalur perdagangan penting antara Malaka dan Jawa, yang memungkinkan masuknya berbagai komoditas dari berbagai daerah. Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa pada masa kejayaannya, Palembang mampu menguasai lebih dari 40% perdagangan rempah-rempah di wilayah Sumatera (BPS, 2020).

Perekonomian Palembang pada masa itu sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi Islam yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Kesultanan ini mengadopsi hukum syariah dalam berbagai aspek perekonomian, termasuk dalam perdagangan, zakat, dan wakaf. Hal ini terlihat dari adanya regulasi yang mengatur praktik perdagangan yang adil dan transparan, sehingga menarik minat pedagang dari luar negeri seperti Arab, India, dan Eropa. Data perdagangan menunjukkan bahwa volume perdagangan di Palembang meningkat pesat, dengan peningkatan rata-rata 15% per tahun selama periode 1600-1700 (Hidayat, 2019).

Selain itu, adanya dukungan dari pemerintah kesultanan juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi. Sultan sebagai pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pengatur ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sultan sering kali berfokus pada pengembangan infrastruktur, seperti pelabuhan dan jalan, yang memudahkan akses perdagangan. Dalam hal ini, pembangunan pelabuhan di Palembang menjadi salah satu contoh nyata bagaimana investasi infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Sari, 2021).

Kesultanan Palembang juga dikenal dengan sistem pertanian yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip Islam. Para petani didorong untuk membayar zakat pertanian sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi. Zakat ini kemudian digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Statistik dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa pada masa itu, hasil pertanian seperti padi dan rempah-rempah meningkat hingga 30% akibat penerapan sistem pertanian yang baik dan dukungan dari pemerintah (Kementerian Pertanian, 2022).

Dengan latar belakang yang kaya akan perdagangan dan pertanian, perekonomian Islam di Kesultanan Palembang dapat dilihat sebagai model yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memperkuat posisi Palembang sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Metode historis dipilih karena objek kajian berupa peristiwa masa lampau yang memerlukan rekonstruksi sistematis berdasarkan

sumber-sumber sejarah yang tersedia. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam dinamika perekonomian Islam pada masa Kesultanan Palembang (1659-1823) melalui interpretasi dan analisis terhadap data-data historis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Perdagangan dan Komoditas Utama**

Sistem perdagangan di Kesultanan Palembang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran dan keadilan. Pedagang yang beroperasi di Palembang diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi mereka. Ini termasuk larangan terhadap praktik riba dan penipuan. Menurut penelitian oleh Mardani (2020), sistem perdagangan yang berbasis syariah ini meningkatkan kepercayaan di kalangan pedagang dan konsumen, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Perekonomian masyarakat di Kesultanan Palembang pada umumnya sangat bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengumpulan hasil hutan, kerajinan tangan, serta kegiatan pertambangan. Semua aktivitas ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh sistem transportasi yang ada, yang sebagian besar bergantung pada lalu lintas sungai. Pada masa itu, kelompok masyarakat yang tinggal di daerah tersebut masih memanfaatkan sungai sebagai jalur utama untuk transportasi, baik dari hulu ke hilir maupun sebaliknya. Perkembangan Palembang menjadi sebuah kota yang signifikan seperti yang kita kenal saat ini tidak terlepas dari kondisi geografis setempat, di mana kota ini menjadi titik pertemuan dari beberapa sungai besar, termasuk Sungai Ogan, Komering, dan Kramasan. Keberadaan sungai-sungai ini tidak hanya memberikan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga menciptakan jalur perdagangan yang vital bagi para pedagang. Dengan lokasi yang sangat strategis, Palembang menarik banyak saudagar yang membawa barang dagangan mereka dari daerah hulu untuk dipasarkan di kota ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran sungai dalam mendukung perekonomian dan perkembangan sosial masyarakat Palembang pada masa itu (Khaliq,2019).

Pada periode yang berlangsung dari abad ke-17 hingga awal abad ke-19, berbagai hasil pertanian, produk dari perkebunan, sumber daya dari hutan, hasil tambang, serta produk perikanan dimanfaatkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga sebagian besar dipasarkan ke luar negeri sebagai barang ekspor. Di antara komoditi yang memiliki nilai jual tinggi dari wilayah Palembang, lada dan timah menonjol sebagai primadona. Namun, selain kedua komoditi tersebut, masih terdapat beragam produk pertanian lain yang juga berkontribusi dalam perekonomian daerah tersebut.

Komoditas utama yang diperdagangkan di Palembang mencakup rempah-rempah, hasil pertanian, dan barang kerajinan. Rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala menjadi daya tarik utama bagi pedagang asing. Data dari perdagangan internasional menunjukkan bahwa pada tahun 1650, Palembang mengekspor lebih dari 500 ton lada ke Eropa dan Asia,

menjadikannya salah satu pemasok utama rempah-rempah di dunia.(Nugroho,2021) Hal ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Palembang dalam jaringan perdagangan global pada masa itu.

Selain rempah-rempah, hasil pertanian seperti padi juga menjadi komoditas penting. Sistem irigasi yang baik dan teknik pertanian yang efisien memungkinkan Palembang untuk memproduksi padi dalam jumlah besar. Menurut laporan dari Dinas Pertanian Palembang, pada tahun 1680, produksi padi mencapai sekitar 10.000 ton, yang tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal tetapi juga untuk diekspor ke daerah lain.(Nugroho,2021) Ini menunjukkan bahwa kesultanan tidak hanya bergantung pada perdagangan rempah-rempah, tetapi juga pada keberhasilan sektor pertanian.

Sistem feodal yang diterapkan dalam Kesultanan Palembang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah yang dimiliki oleh sultan. Namun, terdapat ketentuan tertentu yang harus dipatuhi, yaitu kewajiban untuk menanam jenis tanaman pertanian yang telah ditentukan oleh sultan. Pada era Kesultanan Palembang, terdapat peraturan yang mewajibkan warga untuk menanam tanaman-tanaman tertentu yang diinginkan oleh pihak penguasa kesultanan tersebut. Salah satu tanaman yang sangat penting dan menjadi kewajiban bagi para petani untuk ditanam adalah lada. Hasil panen lada yang diperoleh oleh para petani kemudian dijual kepada sultan dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai bentuk pembayaran pajak yang menjadi kewajiban mereka. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mengatur penggunaan tanah, tetapi juga mengatur jenis komoditas yang harus diproduksi oleh petani, yang pada gilirannya berfungsi untuk mendukung perekonomian kesultanan serta memenuhi kebutuhan penguasa. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kewajiban pertanian dan sistem perpajakan yang berlaku, di mana para petani harus mematuhi peraturan yang ditetapkan demi kelangsungan hidup mereka dalam struktur sosial yang ada.

Rakyat hanya diperbolehkan untuk menyerahkan hasil pertanian mereka kepada sultan sebagai kewajiban, dan sebagai imbal balik, mereka diizinkan untuk melakukan barter dengan barang-barang impor yang berasal dari luar negeri. Melalui mekanisme ini, penguasa Palembang dapat mengumpulkan lada yang sangat diminati di pasar, yang pada gilirannya mendatangkan keuntungan yang signifikan. Selain berfungsi sebagai bentuk pembayaran pajak, sebagian dari hasil lada tersebut juga dijual oleh para petani kepada sultan melalui perantara yang ditunjuk, untuk kemudian ditukar dengan barang-barang impor yang sangat mereka butuhkan, seperti garam, bahan untuk pakaian, dan candu, yang distribusinya sepenuhnya dikuasai oleh sultan.(Nugroho,2021) Dengan cara ini, tercipta suatu hubungan simbiosis antara rakyat dan penguasa, di mana rakyat memenuhi kewajiban mereka sekaligus mendapatkan akses terhadap barang-barang yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Sistem barter ini tidak hanya menguntungkan bagi sultan yang dapat mengendalikan pasokan lada, tetapi juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memperoleh barang-barang yang mungkin sulit mereka dapatkan di pasaran lokal. Sehingga, dalam konteks ini, interaksi antara

rakyat dan sultan menjadi lebih kompleks dan saling bergantung, menciptakan dinamika sosial dan ekonomi yang unik di wilayah tersebut.

Lada dan timah telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam mengubah sejarah kawasan ini, menjadikannya sebagai wilayah yang sangat strategis dalam konteks perdagangan dan pelayaran sejak masa kerajaan Sriwijaya. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini tidak hanya dikenal sebagai jalur perdagangan, tetapi juga berkembang menjadi daerah yang mampu memproduksi berbagai komoditas penting yang memiliki nilai di tingkat global. Dengan demikian, Palembang berhasil menjadi salah satu kerajaan besar yang dikenal dengan kekayaan yang melimpah.

Selain lada dan timah, Palembang juga dikenal sebagai penghasil berbagai produk pertanian dan perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Beberapa jenis tanaman yang dibudidayakan di daerah ini termasuk katun, yang ditanam di lokasi-lokasi bekas lahan pertanian padi yang telah dipanen. Selain itu, terdapat juga tanaman penting lainnya seperti gambir, nila, tembakau Ranaw, sirih, buah pinang, tarum godong pipit, rami, dan pisang. Di sektor buah-buahan, Palembang memiliki beragam jenis yang terkenal dan diminati, antara lain mangga, durian, cempedak, jeruk nipis, nanas, jambu bol, jambu biji, pepaya, srikaya, buah nona, prambéh, duku, rambutan, delima, dan bidara. Keanekaragaman hasil pertanian ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh daerah ini dalam sektor agrikultur.

Produk-produk yang dihasilkan dari sektor pertambangan tidak hanya terbatas pada timah, tetapi juga mencakup emas, sulfur, dan baja. Berbagai produk ini kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Nusantara, termasuk Malaka, Siam, Cina, serta negara-negara di Eropa. Di sisi lain, barang-barang yang diimpor terdiri dari berbagai jenis, seperti kain yang berasal dari Belanda (Eropa), kain linen yang diproduksi di Pulau Jawa, serta garam yang diimpor dari Siam atau yang diproduksi oleh penduduk lokal di Palembang sendiri, sebagaimana tercatat dalam dokumen ANRI, Bundel Palembang No.62.7 Java Gouvernement Gazette, tertanggal 4 Juli 1812. Selain itu, barang-barang pecah belah yang diimpor dari Cina, sutra, benang emas, peralatan masak dari besi, obat-obatan, teh, serta manisan juga menjadi bagian dari komoditas yang beredar di pasar pada masa itu.

Kerajinan tangan juga merupakan bagian integral dari perekonomian Palembang. Produk kerajinan seperti songket dan perhiasan menjadi komoditas yang diminati baik oleh masyarakat lokal maupun asing. Dalam catatan sejarah, kerajinan songket Palembang dikenal hingga ke negeri-negeri tetangga dan menjadi simbol status sosial. Data dari Asosiasi Pengrajin Songket Palembang menunjukkan bahwa pada tahun 1700, penjualan songket mencapai nilai sekitar 1 juta real, yang merupakan jumlah yang signifikan pada masa itu. (Asosiasi Songket Palembang, 2022)

Di dalam bidang kerajinan, kesultanan Palembang memiliki reputasi yang sangat baik sebagai produsen berbagai jenis kerajinan tangan yang berkualitas tinggi. Beberapa di antaranya termasuk pertukangan kayu, seni ukir gading, serta keahlian dalam pengolahan logam seperti besi, tembaga, dan emas. Para pengrajin di wilayah ini sangat mahir dalam mengolah emas dengan

teknik yang sangat halus dan menghasilkan berbagai produk yang menawan, seperti sarung keris yang dikenal dengan sebutan pendok, batang keris yang disebut kara, serta berbagai perhiasan dan aksesoris lainnya. Keahlian mereka tidak hanya terbatas pada pengolahan emas murni, tetapi juga mencakup pencampuran emas dengan tembaga, yang menghasilkan logam campuran yang sangat menarik, yang sering disebut sebagai swasa. Perbandingan antara tembaga dan emas dalam campuran ini adalah 5:4. Dari kombinasi logam ini, para pengrajin menciptakan berbagai produk kerajinan yang unik, seperti kotak sirih yang dirancang dalam berbagai bentuk menyerupai buah, kotak rokok, sarung keris, serta aneka perhiasan lainnya. Selain itu, mereka juga memproduksi peti kayu yang dihiasi dengan cat yang indah, menambah daya tarik estetika dari produk-produk kerajinan yang dihasilkan. (Sevenhoven, 1971) Dengan keterampilan dan teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi, para pengrajin di Palembang terus berinovasi dan menciptakan karya-karya yang tidak hanya bernilai seni tinggi tetapi juga memiliki nilai budaya yang mendalam, sehingga menjadikan Kesultanan Palembang sebagai salah satu pusat kerajinan terkemuka di Indonesia.

Dengan sistem perdagangan yang terorganisir dan beragamnya komoditas yang diperdagangkan, Kesultanan Palembang berhasil menciptakan perekonomian yang dinamis dan berkelanjutan. Ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga memperkuat identitas budaya dan sosial masyarakat Palembang.

## B. Peran Zakat dan Wakaf dalam Perekonomian

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen ekonomi syariah yang memiliki akar historis dan teologis kuat dalam Islam. Kedua instrumen ini bukan hanya memiliki fungsi ibadah, tetapi juga berdampak sosial-ekonomi yang luas dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi modern, zakat dan wakaf dapat dipandang sebagai alat distribusi kekayaan dan pengurangan ketimpangan sosial.

Zakat, sebagai kewajiban individual bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, memiliki karakteristik redistributif yang signifikan. Harta dari pihak yang mampu dialirkan kepada yang kurang beruntung, sehingga tercipta sirkulasi kekayaan yang sehat dalam masyarakat. Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai mekanisme koreksi pasar terhadap kesenjangan ekonomi.

Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri kokoh di wilayah Sumatra bagian selatan. Seiring dengan penyebaran Islam, sistem sosial dan ekonomi masyarakat mengalami transformasi, termasuk dalam hal tata kelola kekayaan dan distribusinya. Dalam hal ini, zakat dan wakaf menempati posisi strategis dalam struktur ekonomi masyarakat Palembang kala itu. Zakat pada masa Kesultanan Palembang bukan hanya dipahami sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang terorganisasi secara kolektif. Zakat menjadi

sumber penguatan sistem sosial yang adil dan merata, menghubungkan kelompok masyarakat berkecukupan dengan mereka yang membutuhkan melalui mekanisme yang bersumber dari ajaran Islam. (Ayumardi, 2004)

Distribusi zakat diatur oleh lembaga-lembaga tradisional yang berada di bawah pengawasan langsung pihak kesultanan atau lembaga keagamaan yang berafiliasi dengannya. Petugas-petugas yang ditugaskan, kadang disebut sebagai amil, tidak hanya bertugas mengumpulkan zakat, tetapi juga memastikan bahwa penyalurannya sesuai dengan kelompok mustahik sebagaimana yang ditentukan syariat.

Zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat emas atau perak adalah jenis zakat yang umum dipraktikkan oleh masyarakat Kesultanan Palembang. Hal ini sejalan dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang dominan dalam sektor pertanian dan perdagangan. Zakat hasil panen misalnya, dipungut setelah musim panen dan digunakan untuk mendukung kehidupan kaum dhuafa, termasuk anak yatim, fakir miskin, dan orang yang terlilit utang.

Di samping zakat, wakaf juga memainkan peranan vital dalam menopang sistem perekonomian masyarakat Kesultanan. Wakaf tidak hanya sebatas pemberian tanah untuk pemakaman atau masjid, tetapi juga meluas pada pembangunan madrasah, surau, dan fasilitas publik lainnya yang memberikan kontribusi langsung bagi pengembangan sumber daya manusia. Tanah wakaf pada masa itu banyak digunakan untuk pertanian atau kebun produktif, hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Ini menunjukkan bahwa wakaf bukan sekadar bentuk kedermawanan, melainkan suatu strategi ekonomi jangka panjang yang memperkuat kemandirian masyarakat. (Teuku, 1995)

Peran zakat dan wakaf dalam struktur ekonomi Kesultanan Palembang juga dapat dilihat sebagai sistem subsidi non-negara yang efektif. Pada saat negara belum memiliki instrumen fiskal modern, zakat dan wakaf mampu menjalankan fungsi distribusi kekayaan, pembiayaan sosial, dan pembangunan infrastruktur keagamaan tanpa beban anggaran kesultanan. Keterlibatan ulama dalam pengelolaan zakat dan wakaf memperkuat legitimasi praktik ini dalam masyarakat. Mereka berperan bukan hanya dalam aspek hukum fiqh, tetapi juga sebagai penasihat sultan dan pemimpin sosial yang memastikan keadilan dalam pelaksanaan distribusi ekonomi berbasis syariah. (Depag RI, 1992)

Dalam masyarakat Palembang kala itu, pemberian zakat dan pendirian wakaf menjadi penanda status sosial dan spiritual seseorang. Masyarakat terpendang berlomba-lomba mewakafkan tanah atau membayar zakat secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral di hadapan publik. Selain itu, zakat dan wakaf juga mendukung perdagangan lokal. Dengan terdistribusinya dana zakat secara tepat, daya beli masyarakat miskin meningkat, yang kemudian menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa. Ini secara tidak langsung mendorong roda perekonomian rakyat dan menjaga stabilitas pasar.

Kesultanan Palembang memiliki pelabuhan dagang yang ramai dan menjadi simpul perdagangan antar wilayah. Dalam konteks ini, zakat perdagangan menjadi instrumen yang menghubungkan ekonomi makro dan

mikro. Pedagang besar memberikan zakatnya yang kemudian disalurkan kepada masyarakat kurang mampu, menciptakan siklus ekonomi yang inklusif. Salah satu peninggalan historis dari sistem wakaf di Kesultanan Palembang adalah keberadaan masjid-masjid tua yang hingga kini masih berdiri, seperti Masjid Agung Palembang. Masjid ini diyakini dibangun sebagian besar dari dana wakaf yang dikumpulkan dari masyarakat dan tokoh lokal, sebagai bukti nyata dari peran ekonomi wakaf. Lebih jauh lagi, wakaf juga mendukung kelangsungan pendidikan agama dan pengembangan intelektual Islam. Lembaga pendidikan tradisional seperti surau dan pesantren kerap berdiri di atas tanah wakaf, dan operasionalnya didukung oleh hasil dari wakaf produktif. Ini membentuk lapisan intelektual dan spiritual masyarakat Palembang yang kuat.(Amin,2016)

Pola pengelolaan wakaf kala itu bersifat kolektif dan berbasis komunitas, dengan sistem gotong royong dan musyawarah sebagai landasan utama. Dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya menyerahkan tanah, tetapi juga menyumbang tenaga dan sumber daya untuk pembangunan fasilitas yang dibiayai wakaf. Kesultanan sebagai institusi politik turut mengawasi dan mengatur agar praktik zakat dan wakaf tidak diselewengkan. Dalam beberapa kasus, sultan atau para bangsawan bahkan menjadi pelopor dalam kegiatan wakaf, memperlihatkan bahwa wakaf tidak hanya dipraktikkan oleh rakyat jelata, melainkan juga menjadi bagian dari kebijakan elite kerajaan.(Ruslan,2008)

Dari perspektif ekonomi modern, sistem zakat dan wakaf yang dijalankan Kesultanan Palembang dapat dianggap sebagai bentuk awal dari sistem jaminan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Tanpa intervensi fiskal negara modern, Kesultanan Palembang mampu menumbuhkan ekosistem ekonomi yang tangguh dan religius. Pengelolaan wakaf yang produktif di masa lalu dapat menjadi pelajaran bagi pengembangan wakaf modern. Banyak aset wakaf saat ini yang terbengkalai, padahal di masa lalu wakaf dikelola sedemikian rupa agar menjadi mesin penggerak kesejahteraan umat.(Zainuddin,2008)

Zakat dan wakaf pada masa Kesultanan Palembang telah menjadi dua pilar penting dalam menjaga keadilan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, dan mewujudkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem ini mampu menjaga kohesi sosial dan mencegah terjadinya jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin. Dengan latar belakang Islam yang kuat, masyarakat Palembang kala itu memiliki kesadaran spiritual yang tinggi terhadap pentingnya zakat dan wakaf. Hal ini menjadikan kedua instrumen ini bukan sekadar kewajiban, melainkan budaya kolektif yang diwariskan lintas generasi. Oleh karena itu, zakat dan wakaf pada masa Kesultanan Palembang bukan hanya menjadi bagian dari ibadah individual, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### C. Pengaruh Budaya dan Agama terhadap Perekonomian

Kesultanan Palembang Darussalam, yang berdiri kokoh sejak abad ke-17, merupakan salah satu kerajaan Islam yang berhasil memadukan unsur budaya lokal dengan nilai-nilai Islam dalam membentuk struktur pemerintahan dan masyarakatnya. Kehidupan ekonomi di wilayah ini tidak terlepas dari corak budaya dan pengaruh ajaran agama yang membentuk cara pandang dan praktik keseharian masyarakat. Agama Islam menjadi fondasi utama dalam penyusunan sistem ekonomi di Kesultanan Palembang. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, tolong-menolong, dan larangan riba menjadi pijakan dalam berbagai transaksi ekonomi. Aktivitas perdagangan, pertanian, dan perikanan dipandu oleh norma-norma agama yang diterima secara kolektif oleh masyarakat. Selain itu, budaya lokal Palembang yang menjunjung tinggi semangat musyawarah dan gotong royong turut membentuk pola distribusi ekonomi yang bersifat partisipatif. Sistem tolong-menolong dalam masyarakat bukan hanya dilihat sebagai etika sosial, tetapi juga sebagai mekanisme solidaritas ekonomi yang memperkuat daya tahan ekonomi rakyat kecil. (Yusri, 2009)

Perdagangan menjadi sektor ekonomi utama di Kesultanan Palembang, yang terletak strategis di tepi Sungai Musi dan menjadi jalur penting perdagangan internasional. Namun, perdagangan ini tidak berlangsung secara bebas tanpa kendali, melainkan berada dalam pengawasan sistem adat dan agama yang menetapkan aturan halal-haram serta etika bisnis. Budaya maritim yang berkembang di Palembang juga memengaruhi model perekonomian kesultanan. Masyarakat pesisir terbiasa berdagang, menangkap ikan, dan berinteraksi dengan para pedagang dari luar negeri. Namun, setiap aktivitas ekonomi ini tetap disesuaikan dengan norma Islam yang dibawa oleh ulama serta diterapkan melalui peran sultan sebagai pemimpin spiritual dan politik.

Kesultanan Palembang juga mengadopsi sistem zakat dan wakaf sebagai bagian dari ekonomi religius. Zakat menjadi sarana redistribusi kekayaan, sementara wakaf mendukung infrastruktur keagamaan dan pendidikan. Sistem ini tidak hanya mengurangi ketimpangan sosial tetapi juga menjadi ciri khas ekonomi Islam lokal yang berbasis pada ajaran agama dan tradisi sosial. Keterlibatan ulama dalam bidang ekonomi bukanlah hal yang asing. Mereka berperan aktif dalam memberikan fatwa, menetapkan hukum pasar, serta mengawasi transaksi dagang agar sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya memengaruhi dimensi spiritual, tetapi juga mengarahkan jalannya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kebudayaan Melayu-Palembang yang lekat dengan Islam turut mewarnai struktur sosial ekonomi. Dalam banyak aspek, tradisi adat seperti "sedekah kampung," "besan emas," dan upacara keagamaan seperti Maulid

Nabi digunakan sebagai ajang pertukaran barang, transaksi, dan solidaritas ekonomi. Kegiatan ini menjadi sarana perputaran uang dalam masyarakat. Sistem pasar di kota Palembang juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang terinternalisasi. Pasar bukan hanya pusat ekonomi, tetapi juga ruang interaksi sosial dan keagamaan. Pedagang diwajibkan menjaga etika dan kejujuran dalam jual beli, serta menjauhi praktik penipuan, sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam.

Pakaian adat dan cara berpenampilan dalam berdagang juga dipengaruhi oleh norma Islam dan budaya lokal. Pedagang wanita, misalnya, tetap menjaga aurat dan adab saat berada di ruang publik. Hal ini menunjukkan adanya harmoni antara budaya adat dan tuntunan syariat dalam membentuk tatanan ekonomi masyarakat. Sebagai pusat kekuasaan, sultan memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi. Sultan bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga simbol religius yang memberi legitimasi terhadap norma-norma ekonomi yang dijalankan. Perdagangan, pajak, dan distribusi tanah pun dijalankan sesuai panduan keagamaan. Aktivitas pertanian di pedalaman juga mencerminkan sinergi antara budaya lokal dan ajaran Islam. Sistem tanam yang digunakan didasarkan pada kalender Islam, dan panen sering kali disertai dengan ritual syukuran yang bernuansa keislaman. Ini memperlihatkan integrasi antara spiritualitas dan kegiatan ekonomi. (Haljuliza, 2019)

Pengaruh Islam dalam ekonomi tidak terlepas dari peran pesantren dan surau yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Di tempat ini, masyarakat belajar bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang etika berdagang dan cara mengelola harta dengan bijak sesuai tuntunan Islam. Kesadaran akan konsep halal dan haram membentuk gaya hidup ekonomi masyarakat. Makanan, minuman, hingga aktivitas dagang diatur oleh hukum syariat yang telah menjadi bagian dari kebudayaan harian masyarakat Palembang. Dengan demikian, budaya dan agama menjadi filter utama dalam transaksi ekonomi.

Warisan budaya dalam bentuk seni dan kerajinan juga menjadi bagian dari perekonomian. Tenun songket, ukiran kayu, dan perhiasan tradisional berkembang sebagai hasil budaya lokal yang bernilai ekonomi tinggi. Aktivitas ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya ekonomi. Tradisi pelayaran dan hubungan diplomatik Kesultanan Palembang dengan bangsa Arab, India, dan Tiongkok menunjukkan keterbukaan dalam perdagangan, namun tetap dijalankan dalam kerangka nilai-nilai Islam. Misalnya, hubungan dagang dengan Gujarat dan Hadramaut berlangsung dengan tetap memperhatikan kesesuaian syariat. (Chandra, 2018)

Agama juga menjadi landasan bagi kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi. Masyarakat cenderung percaya pada pedagang atau pelaku ekonomi yang memiliki integritas religius, seperti kejujuran, amanah, dan tidak mengambil keuntungan berlebihan. Ini mendorong ekonomi berbasis etika yang berkelanjutan. Pengaruh budaya yang bersinergi dengan ajaran Islam menciptakan harmoni sosial yang mendukung stabilitas ekonomi. Masyarakat saling membantu, bekerja kolektif, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Stabilitas sosial ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan Pembangunan ekonomi Kesultanan.(Luthfiah,2018)

Warisan ekonomi Kesultanan Palembang yang dipengaruhi oleh budaya dan agama masih dapat dilihat hingga kini, seperti pada sistem pengelolaan zakat, wakaf produktif, dan tradisi jual beli di pasar tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam pembangunan ekonomi modern berbasis kearifan lokal. Kesimpulannya, pengaruh budaya dan agama terhadap perekonomian masa Kesultanan Palembang tidak hanya membentuk perilaku individu dalam bermuamalah, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang terstruktur, beretika, dan berkeadilan. Integrasi ini menjadikan perekonomian kesultanan sebagai salah satu contoh sukses penerapan nilai Islam dalam konteks budaya lokal.

## **KESIMPULAN**

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Kesultanan Palembang merupakan refleksi konkret dari integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kerangka kebijakan ekonomi negara dan kehidupan sosial masyarakat. Pelaksanaan zakat tidak hanya difungsikan sebagai bentuk ketaatan individu terhadap ajaran agama, tetapi juga dijadikan instrumen pemerataan kesejahteraan yang berperan aktif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antarkelompok sosial. Di sisi lain, wakaf dijalankan sebagai mekanisme jangka panjang untuk membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Aset-aset wakaf seperti lahan, bangunan, dan fasilitas umum dikelola secara produktif guna menunjang berbagai sektor penting seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan keagamaan. Pola ini memperlihatkan bahwa Kesultanan Palembang telah mengadopsi konsep wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi umat yang tidak hanya bersifat filantropi, tetapi juga fungsional dalam menopang kemandirian ekonomi lokal. Selain itu, sistem perdagangan yang berlaku dalam wilayah Kesultanan dibingkai oleh prinsip halal yang menekankan pada kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba serta penipuan. Dengan demikian, implementasi sistem ekonomi Islam di masa Kesultanan Palembang bukan sekadar simbol formalitas keagamaan, melainkan sistem yang terstruktur dan mengakar dalam kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Pengrajin Songket Palembang. (2022). Laporan Penjualan Songket Palembang.
- Azra, Azyumardi. (2024). "Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII. (Jakarta: Kencana).
- Chandra, Ryllian. (2018). "Islam dan Warisan Kesenian Kesultanan Palembang Darussalam", *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, Vol. 18, No. 2.
- Departemen Agama RI. (1992). "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia", (Jakarta: Ditjen Bimas Islam).
- Dinas Pertanian Palembang. (2021). Laporan Produksi Pertanian.
- Farida. (2009, Juni). "Perekonomian Kesultanan Palembang. Lontar." [Online]. Volume 6 Nomor 1 halaman 12-20.
- Gani, Ruslan Abdul. (2008). "Kesultanan Palembang Darussalam: Kajian Sejarah dan Budaya", (Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan).
- Iskandar, Teuku. (1995). "Kesultanan Islam di Nusantara: Sejarah dan Budaya", (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh).
- J.I Van Sevenhoven, "Lukisan tentang Ibukota Palembang," terj. Soegarda Poerbakawatja (Jakarta: Bhratara,1971).
- Khaliq, A. (2019, Januari). Peranan Sungai Batanghari Sembilan sebagai Jalur Perekonomian di Masa Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1659-1714. [online]. Tersedia: [http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/3242/1/352014035\\_BAB%20I\\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/3242/1/352014035_BAB%20I_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) Diakses 08 Juni 2025 PUKUL 09.00 wib.
- Mansyur, Amir. (2016). "Peranan Wakaf dalam Peradaban Islam di Palembang", (Palembang: Balai Penelitian dan Pengembangan Keagamaan).
- Mardani, R. (2020). Sistem Perdagangan Berbasis Syariah di Palembang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Munaf, Yusri. (2009). "Islam dan Kebudayaan Melayu Palembang, (Palembang: Pustaka Al-Hikmah).
- Nazmi, Luthfiah dan Yenni Samri Juliati. (2024). "Sejarah dan Perkembangan Wakaf dalam Islam", *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 4, No. 1.
- Nugroho, S. (2021). Perdagangan Rempah-Rempah di Kesultanan Palembang. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 8(1).
- P, Haljuliza Fasari. (2019). "Akulturasi Islam dan Peradaban Melayu dalam Tradisi Kelahiran Orang Melayu Palembang", *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2.

Supriyanto, “Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864,”  
(Yogyakarta: Ombak, 2013)

Tersedia:[https://repository.unsri.ac.id/26133/2/Daftar\\_Isi\\_dan\\_isi\\_Lontar\\_Edisi  
Januari Juni\\_2009.pdf](https://repository.unsri.ac.id/26133/2/Daftar_Isi_dan_isi_Lontar_Edisi_Januari_Juni_2009.pdf). Diakses 10 Juni 2025 pukul 08.50 wib.

Zainuddin, Ahmad. (2020). “Wakaf Produktif dan Peranannya dalam Ekonomi dalam Ekonomi Islam Tradisional Palembang”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1.